



Buletin Parlementaria

Nomor 1028/II/X/2018 • Oktober 2018

Asian Para Games Momentum Gelorakan Semangat Peduli Disabilitas



9 772614 339005

RUU Kerja Sama Pertahanan RI dengan Arab Saudi dan Belanda Disahkan

Asian Para Games, Momentum Gelorakan Semangat Peduli Disabilitas



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima api obor dari Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto dalam pawai obor Asian Para Games di Kompleks Parlemen.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menggelorakan semangat peduli disabilitas pada momentum Asian Para Games 2018. Sebagaimana penyelenggaraan Asian Games 2018 yang sukses, masyarakat diminta untuk mendukung penuh pelaksanaan Asian Para Games 2018 dan atlet Indonesia yang akan berlaga. Kehadiran serta dukungan masyarakat dalam setiap arena menjadi suntikan semangat bagi para atlet yang bertanding.

“ Kita mendorong pemerintah maupun masyarakat untuk *all out*, sama seperti Asian Games kemarin, kita mampu menyukseskan Asian Para Games. Mari kita gelorakan semangat peduli disabilitas,” ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, usai *torch relay* atau pawai obor Asian Para Games 2018 di Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Minggu (30/9).

Dalam pawai itu, Bamsuet, sapaan akrab Ketua DPR RI, menerima obor Asian Para Games yang dibawa Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto dari pintu gerbang utama Kompleks Parlemen, menuju selasar Gedung Nusantara, dengan diiringi Marching Band Sekolah Tinggi Ilmu

Pelayaran (STIP), dan iringan komunitas motor *gede* dan mobil klasik. Turut hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan Ketua Inapgoc Raja Saptia Oktahari.

Obor Asian Para Games yang telah melewati tujuh kota di Indonesia itu



Foto: Jaka.Odjije/rm

kemudian diserahkan Bamsoet kepada Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dengan mengucapkan “Gelorakan Semangat Peduli Disabilitas”. Selanjutnya, Oesman memberikan api obor kepada atlet Asian Para Games Indonesia Dylan Erlangga, untuk melanjutkan estafet pawai obor ke tempat berikutnya.

Bamsoet menuturkan, disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki semangat tinggi sebab keterbatasan fisik bukan halangan bagi mereka untuk berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. “Ajang ini mengingatkan untuk tidak memandang sebelah mata maupun mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, para atlet Asian Para Games telah menunjukkan bahwa mereka mampu berkompetisi dan meraih prestasi untuk bangsa dan negara,” papar Bamsoet.

Selain itu, legislator Partai Golkar itu menambahkan, penyelenggaraan pesta olahraga ini juga merupakan momentum bagi Indonesia menuju negara yang ramah disabilitas, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“DPR RI sudah membuat UU Penyandang Disabilitas. Ini untuk mewujudkan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan. Sehingga saudara-saudara kita penyandang disabilitas bisa terpenuhi haknya seperti dalam pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, transportasi serta kedudukan yang sama di muka hukum,” tegas Bamsoet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini optimis Indonesia akan mengulang kesuksesan seperti di Asian Games 2018. Tak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga sukses meraih prestasi di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Prestasi sebagai tuan rumah, supporter, maupun perolehan medali yang sudah diperlihatkan pada Asian Games 2018 harus kita lanjutkan pada Asian Para Games 2018 ini. Jangan mengendurkan semangat dan dukungan. Kita harus tetap menjadi tuan rumah yang baik sekaligus menjadi peraih medali emas terbanyak,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama,

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menegaskan, pihaknya satu suara dalam mendukung perhelatan Asian Para Games 2018. Mulai dari sukses penyelenggaraan, hingga sukses prestasi menjadi hal yang terus didukung melalui koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Inapgoc.

“Support kita kepada atlet Asian Para Games dan atlet Asian Games tidak ada beda, semua kita support penuh. Perhelatan akbar ini juga tidak lepas dari koordinasi Komisi X dengan Inapgoc, dalam pemenuhan fasilitas kepada atlet Asian Para Games. Mulai dari tempat duduk hingga lift, terus kita koordinasikan agar semuanya ramah disabilitas,” tutur Djoko.

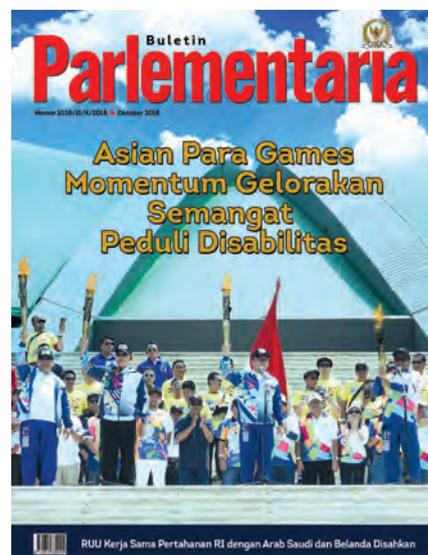
Legislator Partai Demokrat itu mendorong Asian Para Games ini juga akan menjadi momentum Indonesia untuk terus menjadi negara yang ramah disabilitas. Sementara, terkait bonus untuk peraih medali Asian Para Games, ditegaskan Djoko tidak ada perbedaan jumlah bonus yang akan didapatkan peraih medali Asian Para Games.

“Semuanya mengharumkan nama Indonesia. Jadi bentuk penghargaan juga sama. Untuk itu kita berharap para atlet yang berjuang pada Asian Para Games bisa bertanding sebaik mungkin hingga bisa lebih baik dari Asian Games dalam memberikan prestasi,” harap legislator dapil Jawa Tengah III itu seraya mengajak masyarakat untuk menyemarakkan seluruh pertandingan di Asian Para Games.

Dengan mengusung slogan “The Inspiring Spirit and Energy of Asia”, Asian Para Games 2018 akan digelar pada 6 hingga 13 Oktober 2018 di Jakarta. Hingga saat ini, Inapgoc mencatat sebanyak 3000 atlet dari 43 negara, 1800 official, dan sekitar 500 media akan turut serta memeriahkan perhelatan olahraga untuk penyandang disabilitas ini. Indonesia sendiri akan mengirimkan 300 atlet-atlet disabilitas untuk mengisi semua cabang olahraga.

Asian Para Games 2018 akan mempertandingkan 18 cabang olahraga (cabor) yaitu, panahan, atletik, *boccia*, *goal ball*, bola voli duduk, bola basket kursi roda, catur, balap sepeda, dan renang. Selain itu, olahraga angkat beban, menembak, judo, tenis meja, *ten pin bowling*, anggar duduk dan boling lapangan juga akan dipertandingkan. ■

ann,rnm/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah, Gerald Opie

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arief, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima para ulama se-Priangan Timur.

Foto: Rumi/rni

Pesantren Belum Mendapat Perhatian Maksimal

Sektor pendidikan pesantren belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah. Padahal, potensi sumber daya manusia (SDM) dari pesantren sangat tinggi. Bila pesantren mendapat perhatian dan pengelolaan yang baik dari pemerintah, itu tidak saja menggerakkan SDM, tapi juga ekonomi rakyat.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di hadapan para ulama se-Priangan Timur yang menemuinya di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9). "Pendidikan pesantren belum mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah, termasuk madrasah-madrasah atau sekolah agama. Perhatian pemerintah kurang proporsional. Selama ini perhatiannya hanya pada sekolah-sekolah umum."

Anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar

20 persen sebetulnya mencakup pemberdayaan pendidikan pesantren dan sekolah-sekolah agama lainnya. Bila APBN saat ini mencapai Rp2.000 triliun, maka anggaran untuk pendidikan sekitar Rp 400 triliun. "Bagaimana anggaran ini bisa menyentuh pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah agama. Ini isu penting. Jangan hanya memikirkan sekolah umum, karena anggaran itu luar biasa besarnya," kometar legislator Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut Fadli menyampaikan, untuk meningkatkan pendidikan pesantren perlu ada standardisasi baik di pesantren modern maupun tradisional. Ini

penting untuk meningkatkan kapasitas SDM pesantren agar tidak kalah dengan kualitas SDM dari sekolah-sekolah umum. Seperti diketahui, potensi SDM pesantren sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk berkiprah di semua sektor.

Pemanfaatan teknologi digital juga jadi keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan oleh dunia pesantren. Dakwah modern juga kini memanfaatkan teknologi informasi dan digital. "Saya melihat ini potensi yang besar bagi ekonomi keumatan dan pesantren. Tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi. Sekarang serba digital. Dalam bidang dakwah pun sudah menggunakan IT. Ke depan kita akan memikirkan kemajuan pesantren dan sekolah-sekolah agama dan lembaga ekonomi keumatan atau pesantren," seru Fadli.

■ mh/mp

DPR Pelajari Regulasi Pemilu dan Keterbukaan Brazil

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin Delegasi Muhibah DPR RI ke Republik Federasi Brazil. Selain menjalankan bagian dari fungsi diplomasi DPR RI, Fahri memberikan perhatian khusus kepada tema pembiayaan partai politik dan isu korupsi serta parlemen modern.

“ Kita tahu Brazil akan menjalani Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) awal Oktober nanti dan DPR RI mendapatkan banyak masukan bagaimana merumuskan regulasi Pemilu,” kata Fahri di Brasilia, Rabu (26/9).

Selama kunjungan muhibah, DPR RI akan melakukan tiga pertemuan dengan parlemen Brazil dan satu kali pertemuan dengan *Tribunal Superior Eleitoral* (TSE) yang merupakan lembaga pelaksana sekaligus pengawasan pelaksanaan Pemilu. Dengan parlemen Brazil, DPR membahas pembiayaan partai politik, peran parlemen dalam penganggaran negara dan modernisasi parlemen.

Brazil akan melaksanakan Pemilu pada 7 Oktober nanti dengan metode pemilihan *online* bagi warganya. “Indonesia dan Brazil memiliki hubungan sejak Bung Karno yang teman dekat Presiden Brazil Josalino Kubitschek. Secara ukuran juga mirip dengan penduduk di atas 200 juta, sesama negara tropis dan mengandalkan hasil pertanian, peternakan dan tambang,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin M. Singaraju F-PDI Perjuangan yang turut serta dalam muhibah ini.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono (F-PKS) menyatakan bahwa paparan dari Parlemen Brazil menjadi bahan perbandingan dan

masukan terkait Pendanaan Parpol dan Pemilu serta untuk Senator. Suhu politik Brazil makin panas dalam masa akhir kampanye Pilpres. Dilihat ke belakang, pertarungan politik Brazil juga sangat dinamis. Presiden Lula Da Silva diganti suksesornya, Dilma Roussef, wanita pertama di sejarah kepresidenan Brazil yang menjabat sebagai presiden ke-36 sejak 2011.

menjabat.

Tapi ia divonis 12 tahun April 2018 lalu, sehingga tak mungkin berpartisipasi lagi di Pilpres tahun ini. Sementara Michael Temer, wakil presiden (wapres) petahana yang menggantikan Dilma sebagai Presiden saat ini, juga telah diancam penyelidikan dan bersiap masuk bui saat turun jabatan sebentar lagi.

Saat ini, ada 13 capres yang bertarung bebas di Brazil, dari parpol maupun independen. Kandidat presiden paling populer untuk 7 Oktober nanti, Jair Bolsonaro, sekarang terkapar. Ia ditikam tiga kali saat kampanye awal



Foto: Dok/rni

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin delegasi muhibah DPR RI ke Republik Federasi Brazil.

Dilma dimakzulkan parlemen Mei 2016 dalam kasus Petrobras & Odebrecht (perusahaan infrastruktur multinasional). Pemakzulan Ketua Parlemen Eduardo Cunha 5 bulan setelahnya ganti dijatuhkan, lalu dipenjara 15 tahun. Mantan Presiden Da Silva masih sangat populer karena warisan program jaminan sosial saat ia

September lalu.

Delegasi muhibah DPR RI ke Brazil diikuti oleh Erwin M. Singaraju (F-PDI Perjuangan), Fadhlullah (F-Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), R. Alimin Abdullah (F-PAN), Refrizal (F-PKS), Sutriyono (F-PKS), dan Irgan Chairul (F-PPP) beserta staf, tenaga ahli dan Badan Keahlian DPR. ■ eps/mp

Asian Para Games Akan Ciptakan Kondisi Ramah Disabilitas

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto berharap penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang baik berbanding lurus dengan prestasi para atlet nanti. Lebih dari itu, ia melihat ajang ini sebenarnya adalah momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan fasilitas publik agar ramah pada penyandang disabilitas.



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.

Menurutnya, selama ini penyandang disabilitas kurang mendapat tempat dan perhatian di publik, terlebih minimnya fasilitas yang mereka dapatkan kurang berpihak. Untuk itu, ia menginginkan ada kesetaraan bahwa kaum disabilitas akan mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

“Pemerintah harus perhatikan benar hingga hal terkecil dalam membangun fasilitas disabilitas. Kalau kita lihat di luar negeri itu menurut saya seluruh masyarakat disabilitas sangat bisa hidup mandiri karena ditunjang dengan fasilitas pendukung yang lengkap,” kata Utut saat ditemui Parlemenaria di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9).

Terlebih lagi, Indonesia pasti akan banyak dikunjungi kaum disabilitas dari berbagai negara Asia, bahkan dunia, untuk menikmati langsung penyelenggaraan acara yang akan berlangsung. Maka legislator PDI-Perjuangan ini mengimbau agar seluruh fasilitas umum dan gedung-

Foto: Ojil/rni

Komisi II Upayakan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali berjanji akan mengakomodir aspirasi masyarakat Kabupaten Gorontalo terkait peningkatan kesejahteraan aparatur desa. Nantinya, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat agar dapat direalisasikan.

“Terkait aspirasi tentang minimnya kesejahteraan aparatur desa, tentu ini menjadi masukan dan aspirasi bagi Komisi II. Tentu kita akan tindaklanjuti rapat dengan pemerintah pusat,” tutur Zainudin saat memimpin tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Provinsi Gorontalo, Kamis (27/9).

Saat menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala desa se-Kabupaten Gorontalo, Komisi II menerima banyak keluhan, diantaranya terkait minimnya kesejahteraan perangkat desa yang tidak

sebanding dengan tugas besar dalam mengelola dana desa yang nilainya mencapai Rp 1 miliar.

Politisi Partai Golkar ini pun siap untuk memperjuangkan dana desa sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap desa. Sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi yang bertekad membangun dari pinggiran. “Dana desa adalah bentuk nawacita pemerintahan Jokowi yang berusaha membangun Indonesia dari pinggiran,” tegasnya.

Putra asli Gorontalo ini juga



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Provinsi Gorontalo.

mengapresiasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo, dimana tahun lalu mendapat predikat terbaik dalam pengelolaan dana desa dari Kementerian



gedung dilakukan perbaikan untuk menyambut Asian Para Games ini.

“Nanti itu akan datang para turis disabilitas dari seluruh dunia untuk menikmati. Kita harus bersiap melakukan perbaikan-perbaikan mulai dari fasilitas umum, seperti bus, harus dipikirkan bagaimana para disabilitas bisa naik, hingga gedung-gedung juga harus diperhatikan hingga hal terkecil,” tuturnya.

Selain itu, legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut menilai bahwa harus ada insentif selain dalam bentuk hadiah uang. Ia berharap pemerintah juga dapat memberikan insentif dalam bentuk jaminan kehidupan, agar setelah perlombaan berakhir mereka tetap dapat memiliki penghasilan.

“Presiden sudah menjanjikan bonus yang sama dengan yang diraih atlet Asian Games, itu bagi yang dapat emas. Yang tidak dapat bagaimana? Saya kira mereka juga butuh jaminan untuk mengarungi kehidupan mereka agar bisa juga tetap fokus latihan,” tegasnya.

Asian Para Games menjadi rangkaian dari Asian Games 2018, yang akan diselenggarakan di Jakarta. Acara akan dibuka pada tanggal 6 Oktober 2018 dan berlangsung selama 8 hari. Perlombaan ini akan diikuti oleh 42 negara di Asia yang terdiri dari 18 cabang olahraga. ■ eps/sf



Foto: Hendra/mi

Keuangan. Sehingga program dana desa ini sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat Gorontalo, karena berhasil dikelola secara baik. ■ hs/es



Foto: Jaka/rmi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menyerahkan hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I RUU Kerja Sama Pertahanan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan Belanda kepada Rapat Paripurna.

RUU Kerja Sama Pertahanan RI dengan Arab Saudi dan Belanda Disahkan

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan Belanda menjadi Undang-Undang. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah secara aklamasi mengesahkan kedua produk RUU yang dibahas Komisi I DPR RI tersebut.

Kedua RUU itu yakni RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (02/10/2018) mengatakan, pembahasan pembicaraan Tingkat I terhadap kedua RUU tersebut berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka. Akhirnya, fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Arab Saudi dan Kerja Sama RI-Belanda untuk dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu yang menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden RI. Sebelumnya, Satya juga menjelaskan, kerja sama pertahanan dengan Kerajaan Belanda sudah ditandatangani pada 4 Februari lalu di Den Haag, Belanda.

“Dengan disahkannya persetujuan ini menjadi UU, kami berharap keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi. Di samping itu, kami mengharapkan kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” kata Anggota F-PG DPR RI ini.

■ mh,dep/sf

Kunjungi Sumsel, Komisi II Himpun Masukan Penyelesaian Honorer K2 dan ASN



Foto: Andri/rni

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera bertukar cenderamata dengan Penjabat Gubernur Sumsel Hadi Wibowo.

Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan, guna mendalami permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen CPNS, mutasi pegawai, netralitas ASN, dan penanganan Honorer K2. Berbagai hasil temuan akan dibahas pada rapat Komisi II DPR RI dengan mitra kerja.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Gubernur Sumsel, Palembang, Kamis (27/9), dan dihadiri Penjabat Gubernur Sumsel Hadi Wibowo beserta jajaran, Mardani menambahkan kunjungan kali ini dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas konstitusional Komisi II DPR RI di bidang pengawasan dan sesuai hasil keputusan rapat intern Komisi II DPR RI.

“Saya mengapresiasi pertemuan ini. BKN (Badan Kepegawaian Negara, RED) memberikan beberapa solusi untuk penyelesaian honorer K2. Untuk penyelesaiannya, saya berharap segera keluar Peraturan Pemerintah (PP) tentang

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” tandas Mardani, usai pertemuan.

Mardani menambahkan, walaupun solusi itu tidak bisa dilaksanakan, ada kajian dari BKN untuk mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, agar ada terobosan yang baik dan ada *affirmative action* terhadap Honorer K2.

Legislator PKS ini juga mengungkapkan, permasalahan honorer K2 usia di atas usia 35 tahun yang sudah mengabdikan cukup lama, akan dicarikan jalan keluarnya. Setelah berdiskusi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel, maka optimis akan ada

solusinya.

“Kalau belum ada revisi UU ASN, kita meniti peluang yang kecil. Kalau ada revisi UU ASN, maka akan membuat jalur jalan tol penyelesaian Honorer K2. Yang diajukan akan kami pelajari, tapi memang sangat tergantung beberapa pihak yakni Pemerintah Provinsi, Kementerian Keuangan dan dukungan politik dari DPR RI,” jelasnya.

Diungkapkan pula, beberapa pertanyaan diajukan sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, diantaranya bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel terhadap Tenaga Honorer K2 di lingkup Pemprov Sumsel yang berdasarkan hasil tes terakhir dinyatakan tidak lulus.

Menanggapi hal ini, Penjabat Gubernur Sumsel Hadi Prabowo mengatakan, Tenaga Honorer K2 di lingkup Pemprov Sumsel berjumlah

186 orang. Setelah dilakukan seleksi pada tanggal 3 November 2013, dari hasil 186 Honorer K2 dinyatakan lulus seleksi berjumlah 59 orang.

“Dari 59 orang yang dinyatakan lulus tersebut 55 orang sudah diangkat PNS, dan 4 orang lainnya tidak diangkat karena 1 orang meninggal dunia dan 3 orang tidak memenuhi syarat,” kata Hadi.

Sementara itu, Kepala BKD Sumsel Muzakir mengungkapkan, penyelesaian Honorer K2 tetap seperti saat ini sampai adanya perubahan regulasi. Ia juga berharap ada kebijakan khusus bagi honorer K2 yang usianya sudah 35 tahun, tetapi sudah mengabdikan lama agar mendapat prioritas pengangkatan.

“Untuk mengubah itu sudah sejak 2005 kita memberikan masukan, Namun keputusan itu berada di pusat yang membuat regulasi. Kami memberikan masukan kepada DPR RI, karena mereka yang membuat regulasi dan mempunyai kekuatan untuk mengubah itu,” ucapnya usai pertemuan. ■ man/mp

RUU Jabatan Hakim Akomodir Permasalahan Hakim

Tim Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim Komisi III DPR RI mencari informasi, bahan, dan data, baik berupa masukan dari akademisi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), tentang berbagai permasalahan di dunia peradilan, khususnya yang berkaitan dengan status dan manajemen hakim serta mengakomodir berbagai permasalahan terkait hakim.

semua *stakeholder* sepekat tentang pengawasan, karena kekuasaan tanpa pengawasan kecenderungannya akan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan lebih dari kapasitas yang diberikan. Tapi kemudian mereka ingin agar Komisi Yudisial bisa

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait RUU Jabatan Hakim, sehingga pembahasan RUU Jabatan Hakim dapat dilakukan dengan baik dan cermat. Nantinya, dengan adanya RUU ini diharapkan dapat meningkatkan integritas, performa, dan kapabilitas para hakim dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di Indonesia.

"Studi empiris perlu dilakukan untuk mencari data dan masukan sebanyak-banyaknya dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah-daerah," katanya di sela-sela FGD Komisi III DPR RI terkait pembahasan RUU Jabatan Hakim dengan Kapolda Sumbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Pengadilan Tinggi Sumbar, Kakanwil Hukum dan HAM Sumbar, Akademisi Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Peradi Sumbar, di Mapolda Sumbar, Kamis (27/9).

Syafi'i menjelaskan ada beberapa masukan krusial tentang RUU Jabatan Hakim dalam pertemuan ini. Semua *stakeholders* yang hadir setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU Jabatan Hakim. Namun mereka masih tetap mempersoalkan batasan umur hakim, baik itu hakim pertama, hakim tinggi maupun hakim agung. Internal hakim cenderung tetap pada UU sebelumnya, bahwa Hakim Pertama itu adalah 60 tahun, Hakim Tinggi 65 tahun, dan Hakim Agung 70 tahun.

Tetapi kemudian ini menjadi soal ketika UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa hakim baik dari tingkat pertama, hakim tinggi maupun hakim agung adalah pejabat negara. Pejabat negara dipahami saat ini memiliki periodisasi. Periodisasinya adalah 5 tahun, dan jika ini diterapkan, maka akan terjadi perubahan dalam masa atau umur dari umur dari tingkatan itu.

"Ini yang kemudian menjadi bahan



Tim Kunspek Komisi III DPR RI berfoto bersama jajaran Polda Sumatera Barat.

diskusi. Dari akademisi setuju hakim agung diawali dari 55 tahun dan hanya bisa memegang jabatannya selama 2 periode. Artinya dia harus pensiun dalam usia 65 tahun," imbuh legislator Partai Gerindra ini.

Kemudian soal independensi, menurutnya jika hakim independen dalam satu atap Mahkamah Agung, maka yang menjadi soal adalah pola rekrutmen. Jika rekrutmennya masih sama dengan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN), maka ini sudah memulai terganggunya proses independensi. "Sepertinya mereka menginginkan kalau hakim itu betul betul independen, maka pola rekrutmennya harus spesifik MA. Jadi tidak mengikutsertakan aparaturnya yang lain, dalam hal ini Menteri PAN-RB," paparnya.

Kemudian dalam penetapan Hakim Agung, mereka kemudian bersoal kalau kemudian menjaga independensi sebenarnya sudah tidak cocok kalau melibatkan unsur yang lain, misalnya ada uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) 5 tahunan di DPR RI. Ini bisa mengganggu independensi, karena mungkin masuk kepentingan-kepentingan politik dari Anggota DPR RI pada *fit and proper test* itu.

Lebih lanjut mengenai pengawasan,

satu nafas dengan MA, karena yang mereka rasakan ada perbedaan stigma yang ada di MA dengan KY dalam melakukan pengawasan.

"Mereka ingin dalam UU ini diselaraskan. Kalau pengawasan internal di Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dan itu tidak boleh ada tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain," tandas legislator dapil Sumatera Utara itu.

Legislator yang akrab dipanggil Romo itu menambahkan, pihaknya menginginkan mendapatkan masukan, sehingga lebih komprehensif bisa mengisi ruang-ruang yang belum sempurna pada UU yang *existing*. Ada semacam keinginan dari publik, RUU ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya, keinginan yang sama juga ada pada Komisi III DPR RI.

"Akan tetapi, menurut kami adalah menyempurnakan konten dari UU ini. Sehingga kalau sedikit terlambat, tetapi kita bisa memastikan ketika UU ini disahkan bisa menjadi *guidance* yang komprehensif bagi penataan jabatan hakim dimasa-masa yang akan datang. Komisi III menargetkan dan berharap sebelum masa kerja DPR 2014-2019 berakhir kita bisa menyelesaikan UU ini," tegasnya. ■ as/sf

Foto: Agung/rni

Lifting Gas 2019 Harus Naik

Lifting gas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2019 harus naik dari sebelumnya. Komisi VII DPR RI menilai, kenaikan *lifting* gas bisa hingga 10 persen dari usulan pemerintah yang hanya 4 persen. Kenaikan ini untuk meningkatkan iklim usaha di dalam negeri lebih kondusif. Kenaikan *lifting* 4 persen dikhawatirkan kurang menarik sektor industri.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI mengunjungi Kantor Pertamina di kawasan Sicanang, Belawan, Medan, Sumut.

Foto: Anief/rni

pipa gas digantikan truk gas untuk mendistribusikan gas. Sementara di Sumut sendiri, banyak perusahaan belum memakai gas untuk produksi usahanya. Ini jadi tantangan bagi Kementerian ESDM dan BUMN bidang energi, seperti Pertamina, Petragas, PGN, dan lain-lain.

“Jadi tantangan bagi pemerintah bahwa gas yang ada di bumi Indonesia ini cukup dan melimpah, tapi distribusinya yang harus dipikirkan. Membangun jaringan pipa memang sangat mahal. Harus ada pemikiran bagaimana transportasi gas itu bisa lebih efisien dan lebih murah sampai di kawasan-kawasan industri dan rumah tangga,” kata Ridwan.

Pemerintah pun diimbau membuat akses jaringan distribusi gas di perumahan-perumahan masyarakat. Tinggal masalahnya, masyarakat perlu diberi informasi dan edukasi yang cukup soal ini. Yang ada sekarang, masyarakat terbiasa menggunakan tabung gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangga. Bila akses gas lewat pipa ke rumah tangga sudah terbangun, niscaya masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah, bisa 30 persen dari harga elpiji.

“Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun jaringan distribusi gas. Yang penting hasil *lifting* gas kita itu naik dan itu masuk menjadi sumber dari APBN. Pemasukan kita bisa naik. Minyak dan gas juga yang tinggi di Indonesia belum tergarap dengan maksimal,” tutup legislator dapil Jawa Timur itu. ■ afr/sf

“Sumber gas di dalam negeri melimpah. Untuk itu target *lifting* gas dalam RAPBN mestinya bisa ditingkatkan. Namun, persoalan hari ini adalah distribusi yang membutuhkan pipa yang cukup besar,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR

RI Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Pertamina di kawasan Sicanang, Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Minggu (30/9)

Terkait distribusi gas itu, legislator Partai Golkar itu tidak menginginkan

PT. Growth Asia Menjadi Contoh Hasilkan Energi dari Limbah

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai, PT. Growth Asia Sumatera Industry di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara bisa dijadikan *role model* atau contoh bagi daerah lain dalam hal menghasilkan energi dari limbah.

“Ini bisa menjadi *role model* bagi wilayah-wilayah lain, bagaimana mengolah sampah limbah menjadi energi,” ucap Gus Irawan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau PT. Growth Asia di Medan, Sumut, Sabtu (29/9). PT. Growth Asia sendiri merupakan

pembangkit listrik tenaga biomassa yang bahan bakunya menggunakan limbah dari cangkang sawit, bakul jagung, kulit-kulit kayu. PT. Growth Asia sudah berhasil membuat 5 PLTU di Sumut, dari total 8 PLTU di Indonesia

Gus Irawan menyampaikan, di Sumut, khususnya di Kabupaten Nias, Biaya Pokok

Produksi (BPP) PLN sangat mahal, mencapai Rp 2600 per KWH, sementara PT. Growth Asia hanya menjual ke PLN Rp 1150 per KWH. “Kalau ini bisa dibuat di Nias, maka PLN akan menjadi lebih efisien dan energi yang dihasilkan juga bisa lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

Menurut legislator Partai Gerindra itu, Provinsi Sumut sangat cocok untuk pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Jika menggunakan bahan baku batu bara, Sumut memang tidak memproduksi apa yang menjadi bahan bakunya tersebut. Ia juga menyatakan,

Komisi VII Temukan Ketidakjelasan Pengelolaan Limbah di KIM Medan

Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meninjau salah satu perusahaan pengelolaan limbah yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM), Sumatera Utara. Berbagai temuan dari hasil peninjauan akan dibahas di Panja, termasuk memanggil perusahaan-perusahaan dan direktorat jenderal terkait.



Foto: Runi/rni

Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meninjau pengelolaan limbah di Kawasan Industri Medan (KIM), Sumut.

“Kita lihat dari limbah yang mereka hasilkan, menurut saya sampai pemusnahannya tidak ada dokumentasi yang jelas, tidak ada manajemen yang jelas dan limbah ini

tidak dibuang pada tempatnya yang harus disediakan untuk pemusnahannya,” kata Nasir usai memimpin peninjauan di KIM, Medan, Sumut, Sabtu (29/9).

Dalam kesempatan itu, Panja Komisi

VII DPR RI didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan R. Karliansyah, beserta jajaran Direksi KIM.

Legislator Partai Demokrat ini menambahkan temuan ini harus segera diselesaikan, agar masalah ini bisa cepat dan ada solusi. Sehingga masyarakat yang berada di lingkungan pengelolaan limbah tidak terkena dampak. Untuk itu, saya meminta perusahaan yang bersangkutan harus menjaga mutu dan merawat kondisi limbah yang mereka keluarkan sampai melihat pemusnahan limbah tersebut,” tandas Nasir.

Ia juga mengingatkan dinas-dinas maupun kementerian yang mengatur pemberian izin atas pengelolaan limbah tersebut, pihaknya meminta dengan tegas untuk mengecek terlebih dahulu izin dan dokumen yang bersangkutan. Sehingga dapat diketahui apakah nantinya ada perusahaan yang melanggar peraturan atau melanggar kewenangan.

“Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII akan menanyakan langsung pada dirjen yang bersangkutan untuk bertanggung jawab. Hal tersebut dilakukan sebagai fungsi pengawasan untuk bisa menindak perusahaan yang nakal atau tidak berkelakuan baik,” tegas legislator dapil Riau II itu.

PT. KIM memiliki dua unit pengelolaan air limbah *wastewater treatment plant* (WWTP) tahap I dengan kapasitas 3600 M3 per hari, WWTP tahap II dengan kapasitas 18000 M3 Perhari. Limbah cair produksi sebanyak 35 perusahaan, limbah cair domestik sebanyak 192 perusahaan dan debit air limbah yang dikelola sampai bulan Agustus 2018 rata-rata mencapai sebesar 116.902 M3 perbulan atau 3.897 M3 per hari.

Di kawasan KIM terdapat 31 perusahaan yang memiliki unit pengelolaan limbah. saat ini memiliki kapasitas pengelolaan limbah sebesar 18.000 meter/kubik per hari cukup untuk mengelola seluruh limbah industri perusahaan. ■ rni/sf

untuk di Sumut kelistrikannya masih sangat kecil surplusnya, yakni sekitar 6 persen, padahal idealnya adalah 30 persen.

“Kami terus mendorong di Sumatera Utara untuk pembangunan pembangkit listrik. Dan kami lebih cenderung memilih (pembangkit) yang ramah lingkungan, karena di Sumatera Utara ini sumber daya energinya memang tidak ada batu bara. Tetapi energi terbarukan di sini cukup besar, ada *geothermal*, yang potensinya sampai 1000 Mega Watt,” harap legislator dapil Sumut itu. ■ azk/sf



Foto: Azka/rni

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke PT. Growth Asia di Medan, Sumut.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron bertukar cenderamata dengan mitra kerja di Makassar.

RUU Pertanahan akan Lengkapi UU Pokok-Pokok Agraria 1960

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengawasan dan pemantauan pada program Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta penyelesaian konflik agraria. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeiron menyampaikan setiap informasi dan masukan tentang agraria akan dijadikan landasan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Herman sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan menjelaskan, RUU Pertanahan ini sebagai komplementasi untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebab, saat ini banyak sekali yang sudah berubah dalam masyarakat, dalam

penyelenggaraan negara dan dinamika ekonomi.

Menurutnya UU Nomor 5 tahun 1960 masih bersifar *lex generalis* untuk melengkapi itu maka RUU Pertanahan akan disusun bersifat *lex specialis*. “Belum ada pengaturan secara khusus, kami berharap Undang-Undang Pertanahan menjadi *lex specialis*, dari *lex generalis*, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960,” jelas Herman di Makassar, Kamis (27/9).

Dia mengatakan, setiap informasi dan masukan yang terkait dengan ke-agrarian, akan dijadikan dasar pertimbangan penyusunan RUU Pertanahan. “Kami ingin menjadikan Undang-Undang Pertanahan ini sebagai landasan hukum, karena bagaimana pun Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960, itu kan *lex generalis*, sangat umum, mengatur agraria di Indonesia, tetapi untuk mengatur tatacara pertanahan secara nasional sebagai hak penguasaan negara perlu aturan *lex specialis*,” ungkap Herman.

Terkait dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

“Kami sudah melakukan pertemuan, terkait PTSL sudah di atas 60 persen dan untuk Reforma Agraria sudah dijalankan terus, sudah 70 persen. Dan konflik-konflik agraria harus ada tatacara yang memastikan bahwa pemberian status atas hak tanah itu harus memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak menjadi konflik di kemudian hari,” beber Herman.

PTSL atau sertifikasi tanah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

■ eko/mp

Perhatian Serius Terhadap Papua Mutlak Diperlukan

Perhatian serius terhadap Provinsi Papua merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka mengatasi keteringgalan wilayah dan kepentingan yang ada. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus aktif untuk menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan agar menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Semua harus berdasarkan data yang valid agar setiap kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI di Provinsi Papua, Kamis (27/9).

Oleh sebab itu, tambah Ace, Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI ingin memastikan dan ingin mengetahui sejauh mana proses pendataan yang telah dilakukan selama ini di Papua terhadap penerima program-program bantuan sosial dari pemerintah. Termasuk memastikan apakah selama ini data-datanya sudah valid, akurat, dan sesuai dengan perkembangan mutakhir.

“Kami banyak mendapatkan masukan bahwa memang masih ada kekurangan di sana-sini, terutama mengenai pemutakhiran data tersebut. Hal ini terkait juga dengan bagaimana pusat data dan informasi pusat di bawah Kementerian Sosial memiliki sistem yang memungkinkan bagi proses verifikasi dan validasi secara *up to date* sesuai dengan perkembangan,” imbuh Ace.

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyatakan, memang harus diakui, terkait persoalan verifikasi dan validasi data ini masih terbatas. Hal itu dikarenakan pelibatan pemerintahan daerah dalam masalah verifikasi dan validasi tersebut masih sangat terbatas.

Bahkan saat ini masih ditemukan adanya penggunaan data lama.

“Oleh karena itu, kita ingin mencoba agar sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dapat dilakukan dengan lebih terbuka. Sehingga setiap perubahan-perubahan dinamika sosial dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat bisa sesuai dengan data yang akurat,” tandasnya.

Ace mengatakan, permasalahan verifikasi dan validasi data kemiskinan juga harus mempertimbangkan aspek

dan kondisi sosio geografis di suatu daerah, contohnya Papua. Pertimbangan tersebut diperlukan karena di daerah pegunungan ataupun pesisir yang sulit terjangkau untuk dilakukan pendataan, tentu akan menimbulkan sebuah konsekuensi.

“Misalnya, apakah data-data kemiskinan tersebut sampai dengan kebutuhan operasionalnya ada atau tidak. Menurut saya, harus dibedakan kondisi geografis

di masing-masing daerah sehubungan dengan masalah verifikasi dan validasi data kemiskinan itu,” tegasnya.

Menurut legislator dapil Banten ini, diperlukan *treatment* khusus guna menurunkan data kemiskinan di Papua. “Kita harus memiliki data seakurat mungkin. Kalau angka kemiskinan di Papua turun, maka otomatis secara nasional pun ikut berpengaruh,” pungkasnya. ■ dep/mp/sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily.

Foto: Devi/rni

Malang Menjadi Percontohan Penanggulangan *Stunting*



Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kota Malang, Jawa Timur.

Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengatakan, tingginya kasus *stunting* di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bisa menjadi *pilot project* pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Pasalnya, berdasar informasi pada Maret 2018 lalu, ada kasus sebanyak 4.007 anak balita di bawah usia lima tahun mengalami *stunting* di Kota Malang.

Bahkan, merujuk data resmi Dinas Kesehatan Kota Malang, jumlah balita yang mengalami *stunting* kategori sangat pendek sejumlah 978 anak dan kategori pendek ada 3.029 anak. Jumlah tersebut didapat dari total balita di Kota Malang sebanyak 54.469 anak.

“Karena tingginya kasus *stunting* yang ditemukan di Kota Malang dan sekitarnya inilah, maka Malang bisa dijadikan *pilot project* pencegahan dan penanggulangan *stunting*,” kata Suir Syam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Kota Malang, Jatim, Jumat (28/9).

Legislator Partai Gerindra itu menambahkan, dalam pertemuan dengan dinas terkait di Kota Malang, terungkap ada perbedaan data mengenai jumlah balita yang mengalami *stunting* di Kota Malang, antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Malang, dan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, perbedaan data ini merupakan hal yang biasa.

“Perbedaan ini terjadi karena ada sampel *stunting* yang mungkin tidak seimbang antara jumlah penduduk di lapangan dan data dari dinas atau rumah sakit. Sehingga perlu adanya pemuktahiran data kembali. Data *stunting* yang tadinya

Foto: Guntur/rni

Komisi XI Tinjau Klaster Binaan BI di Lembang

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan meninjau sejumlah klaster binaan Bank Indonesia (BI) di Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kamis (27/9). Tim Kunspek Komisi XI DPR RI pun menggelar dialog kepada para klaster binaan BI itu.

Marwan mengatakan, dari hasil peninjauan, diketahui bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lembang Agri merupakan salah satu kelompok gapoktan binaan BI yang sudah berhasil dalam produk hortikultura. Gapoktan ini bukan hanya mensuplai kebutuhan lokal tetapi juga mensuplai kebutuhan luar atau

ekspor. Ini merupakan contoh konkret masuknya dolar ke Indonesia.

“Tak hanya mengawasi, kami juga menyerap banyak aspirasi di Lembang. Ada beberapa persoalan yang telah kami terima, misalnya persoalan lahan yang belum jelas pembagiannya. Kemudian persoalan infrastruktur pertanian, persoalan pembibitan, persoalan



Foto: Chasbi/rni

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan memimpin Tim Kunspek Komisi XI DPR RI meninjau klaster binaan BI di Desa Cikidang, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.

permodalan, persoalan pasca panen, hingga persoalan pemasaran. Ini nanti akan kami tindaklanjuti dengan segera,” jelas Marwan, usai peninjauan.

Legislator Partai Demokrat itu



dinilai tinggi 2017, sudah mulai menurun secara signifikan tahun 2018 ini,” imbuh legislator dari Sumatera Barat itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir mengatakan, dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Kota Malang kepada Komisi IX DPR RI per Maret 2018, balita yang mengalami *stunting* sebesar 8 persen, dan pada September 2018 ini sudah di bawah 6 persen. Menurutnya, jika ini dapat dipertahankan, Kota Malang bisa menjadi percontohan.

“Ini rentang perubahannya sangat signifikan. Bila valid dan terus dipertahankan, Kota Malang akan menjadi *pilot project* yang baik. Penting bagi pemerintah untuk terus menjaga stabilitas *stunting*. Karena generasi saat inilah yang sedang didorong lepas dari *stunting*. Merekalah yang akan produktif mengawal majunya Indonesia 2045,” kata Ali Mahir.

Legislator Partai NasDem itu juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan Kota Malang yang sudah mempunyai program-program penanggulangan *stunting* yang baik, ahli gizi yang banyak, serta memiliki kader-kader Posyandu yang kredibel.

“Tinggal bagaimana dinas-dinas terkait lainnya membantu penanggulangan ini jadi lebih efektif lagi. Sanitasi diperbaiki, pendidikan kesehatan terhadap gizi buruk juga terus disosialisasikan, pola dan karakter hidup sehat juga dikembangkan,” pesan legislator dari Jawa Tengah itu. ■

gd/sf



menambahkan, hasil temuan maupun aspirasi yang didapat Komisi XI DPR RI akan dibicarakan, ditangani serta dikoordinasikan dengan BI. Salah satunya masalah permodalan. Ia berharap Gapoktan Lembang Agri bersama Anggota Komisi XI DPR yang berasal dari wakil Jawa Barat bisa berkoordinasi dengan Lembaga Pembiayaan Esport Indonesia (LPEI).

“Menurut saya LPEI juga sedang mencari kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekspor, tetapi mengalami kesulitan

permodalan. Saya pikir mitra binaan BI perlu terus dibina agar ke depannya kelompok-kelompok masyarakat bisa menjadi proyek percontohan yang bagus,” imbuh legislator dari Lampung itu. ■ cas/mp/sf

Komisi IX Apresiasi Program BLK Komunitas Berbasis Pesantren di Jatim

Komisi IX DPR RI mengapresiasi program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Berbasis Pesantren di Jawa Timur. Hingga saat ini hampir 50 BLK yang bisa dijadikan percontohan untuk pengembangan BLK di seluruh Indonesia. DPR RI pun setuju dan mendorong agar BLK Komunitas Berbasis Pesantren dibangun di seluruh Indonesia.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus.

Foto: Nadya/rni

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan, terkait beberapa kendala yang dialami oleh BLK

Komunitas Berbasis Pesantren, diantaranya standarisasi instruktur, pihaknya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat melakukan proses standarisasi instruktur. Dengan adanya standarisasi itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas peserta BLK.

“Standarisasi ini juga bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas peserta BLK Komunitas Berbasis Pesantren tersebut,” kata Ichsan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, di ruang rapat Disnakertrans, di Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/9).

Hal penting lainnya yang disoroti oleh Ichsan adalah perlu adanya penyertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi pengajar dan pegawai di BLK tersebut. Karena selama ini hanya peserta

didik saja yang mendapatkan fasilitas dan layanan tersebut.

“Nah inilah kemudian menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, agar bukan hanya peserta didik saja yang mendapat layanan BPJS, tapi juga pengajar dan pegawai yang mengelola BLK ini,” ungkap legislator Partai Golkar itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menjelaskan, tujuan adanya program BLK Komunitas Berbasis Pesantren ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan *skill* tambahan kepada tenaga kerja Indonesia yang belum memiliki kecukupan pengetahuan umum seperti di sekolah formal lainnya.

Irma berpendapat seharusnya pengelola BLK berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan besar terkait saluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). “Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan besar terkait dana CSR untuk membantu, menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh BLK,” papar legislator Partai NasDem ini.

Turut hadir dalam Kunspek ini Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaon Daulay, dan sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI diantaranya Riski Sadig dan Hang Ali Saputra Syahpahan dari F-PAN, Elva Hartati dan Ketut Sustianawati dari F-PDI Perjuangan.

Kemudian Betty Shadig Pasadigoe, Yayat Biaro, Syamsul Bachri, dan Julianus Poteleba dari F-PG, Ayub Khan, Lucy Kurniasari, dan Aliyah Mustika Ilham dari F-PD, Handayani dan Aryanto Munawar dari F-PKB, Ansory Siregar, dan Adang Sudrajat dari F-PKS, serta Frans Agung Mula Putra (F-Hanura). ■ ndy/es/sf

Pasca Asian Games, Komisi XI Minta Infrastruktur di Sumsel Tetap Dikembangkan



Foto: Anne/rni

Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir bertukar cenderamata dengan perwakilan mitra kerja di Palembang, Sumasel.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengatakan sejumlah infrastruktur yang sudah dibangun sebagai penunjang perhelatan Asian Games 2018 harus tetap dikembangkan, agar berdampak positif bagi perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel).

Demikian diungkapkan Hafisz dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan terkait evaluasi pasca penyelenggaraan Asian Games 2018. Turut hadir Gubernur Sumsel, Hadi Prabowo beserta jajaran, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel dan Bank Indonesia (BI).

“Sumatera Selatan sudah mempunyai fasilitas olahraga yang memadai. Jika tidak didukung dengan keberlanjutan event olahraga lain pasca Asian Games, maka akan hanya jadi aset atau barang yang tak bernilai,” paparnya, Rabu (26/9).

Ia menuturkan, sejumlah pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, seperti LRT (*Light Rail Transit*), *Jakabaring Sport City*, Pengembangan Bandara, Jembatan Musi

IV, Musi VI, Pembangunan Hotel dan lainnya bisa menjadi modal dasar untuk mengadakan event olahraga berskala internasional.

“Kita jadikan modal dasar kita untuk mencari kegiatan atau industri yg berbasis pariwisata dan industri berbasis event olahraga. Kami sebagai wakil rakyat akan terus mensupport sepanjng *venue* atau infrastruktur ini bisa membangkitkan ekonomi daerah,” jelas Hafisz.

Menurutnya, penyelenggaraan Asian Games telah membawa dampak cukup signifikan pada perekonomian Sumatera Selatan. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Sumsel TW II 2018 tercatat sebesar 6.07 persen. Pencapaian ini merupakan tertinggi selama empat tahun terakhir dan berada diatas *growth* nasional.

“Ini pertumbuhan yang menggembirakan berada diatas rata-rata nasional. Asian Games berhasil memicu pertumbuhan ekonomi dan juga membangkitkan industri-industri kecil berbasis UMKM,” jelas politisi F-PAN DPR RI ini.

Selain di bidang olahraga, Hafisz juga mendukung infrastruktur yang telah ada untuk disinkronisasi dengan pengembangan di sektor pariwisata. Melihat bisnis UMKM dan cinderamata juga akan ikut terangkat dengan adanya kunjungan wisata mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Penyelenggaraan Asian Games 2018 telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga di Sumsel tumbuh cukup baik di level 4.07 persen. “Jika hanya fokus olahraga maka sisi yang maju hanya sebagian kecil, kita lebarkan, masukkan industri pariwisata dan industri yang berbasis rumah tangga sehingga dampak ekonomi pasca asian games ini bisa juga menyentuh masyarakat kecil,” pungkask politisi dapil Sumatera Selatan itu. ■ ann/es

Komisi XI DPR Terkesan Kreatifitas Griya Coklat Nglanggeran

Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi salah satu wilayah penghasil biji kakao di Indonesia dan berhasil mengelola biji kakao menjadi produk-produk yang bernilai jual tinggi. Tepatnya di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, telah mengembangkan produksi cokelat, di mana sebelumnya hanya sebatas dijual mentah atau kakao kering ke pengepul.

“Kedatangan kita ke Gunungkidul, dalam rangka melihat secara langsung UMKM yang mendapat bantuan dari Bank Indonesia melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI),” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Prakosa saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Griya Cokelat Nglanggeran, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Rabu (26/09).

PSBI sudah dianggarkan sebanyak Rp 400 miliar untuk tahun ini ke seluruh Indonesia, termasuk untuk pembinaan UMKM-UMKM seperti Griya Cokelat Nglanggeran. Apalagi Gunungkidul

merupakan salah satu wilayah yang mampu mengelolah potensi daerahnya dengan baik.

“Setiap tahunnya anggaran PSBI selalu mengalami peningkatan dan kita

Di Gunungkidul ada desa wisata yang juga memproduksi cokelat dan dengan bantuan PSBI semakin mempercepat pembangunan desa wisata tersebut

melihatnya memang memiliki dampak yang baik terhadap ekonomi kerakyatan kita,” ungkap legislator PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut untuk melihat sampel-sampel penerima PSBI yang sudah berjalan dengan baik dan berharap keberhasilan Gunungkidul bisa ditularkan ke daerah-daerah lainnya.

“Di Gunungkidul ada desa wisata yang juga memproduksi cokelat dan dengan bantuan PSBI semakin mempercepat pembangunan desa wisata tersebut. Saya kira hal yang positif ini harus ditingkatkan dan saya berharap PSBI ini bisa diberi porsi anggaran yang besar,” jelas legislator dapil Jawa Tengah itu.

Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta, menjadi desa wisata terbaik di Indonesia dan menerima penghargaan di ASEAN Community Based Tourism (CBT) Award pada Tahun 2017.

Griya Cokelat merupakan *home*

industry yang sudah mampu memproduksi sekitar 6.000 bungkus minuman bubuk cokelat yang dikemas dalam kemasan kecil. Untuk penjualan, pihaknya memanfaatkan media sosial dan toko besar di sekitar Kecamatan Patuk.

Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung dan membeli cokelat di Griya Cokelat Nglanggeran menjadikan perekonomian warga meningkat. Sebab, biji kakao kering yang awalnya dijual Rp 20.000 per kilonya, sekarang bisa dijual dengan harga Rp 250.000 per kilo. ■ skr/mp



Foto: Singgih/rni

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Prakosa memimpin Tim Kunspek Komisi XI DPR RI ke Griya Cokelat Nglanggeran, Gunungkidul, DIY.



Tim Kunker Baleg DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR Arif Wibowo berfoto bersama Gubernur Bali.

Foto: Sofyan/rni

Bali Usulkan Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958

Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Provinsi Bali mendapatkan sejumlah masukan dan aspirasi terkait Program Legislasi (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2019. Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu usulan Pemerintah Provinsi Bali, agar dapat direvisi.

“ UU Nomor 64 Tahun 1958 merupakan aspirasi lama dari Pemerintah Bali. Nanti akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Arif Wibowo usai memimpin pertemuan Tim Kunker Baleg DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran dan civitas akademika di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Jumat (28/9).

Arif memastikan, ke depannya dalam revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 itu akan diatur lebih lanjut sebagaimana UU yang mengatur satuan pemerintahan daerah di Indonesia, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi, agar lebih sempurna. Apalagi, menurut Arif, dengan sektor pariwisata

yang menjadi unggulan Bali, perlu ada beberapa perubahan variabel penting pada regulasinya, untuk mendukung kekhasan Bali.

“Ada kekhasan yang bisa diatur secara spesifik, melalui UU Nomor 64 Tahun 1958 yang sedianya dilakukan perubahan. Sehingga Bali bisa diatur secara UU tersendiri, yang tentu saja dilakukan pengaturan yang sifatnya spesifik, dan menjadi kekhasan Bali. Namun Bali itu tetap dalam kerangka NKRI, dan tidak bersifat khusus yang berlebihan,” imbuh legislator PDI-Perjuangan itu.

Aspirasi lain yang turut didapatkan Tim Kunspek Baleg adalah perlu adanya revisi pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Arif menjelaskan, dalam UU yang sudah *existing* itu, tidak mengatur sektor pariwisata sebagai salah satu variabel yang dihitung dalam rangka distribusi alokasi dana untuk Provinsi Bali.

“Ini aspirasi yang konkret dan relevan, dan menjadi faktor menentukan dinamika dan kemampuan Bali dalam membiayai daerahnya sendiri dan mengembangkan Bali menjadi satu provinsi yang lebih maju di masa yang akan datang. Sebagian besar aspirasi ini sedang kami tindaklanjuti di dalam RUU yang sudah dibahas di DPR,” tambah legislator daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster berharap revisi UU Nomor

64 Tahun 1958 dapat masuk menjadi salah satu RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Menurutnya, UU Nomor 64 Tahun 1958 itu masih mengacu Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, sehingga perlu adanya revisi. Ia pun memastikan pihaknya telah menyiapkan naskah akademik untuk revisi UU itu.

“Naskah akademik sudah selesai, dan diperkirakan akhir November ini selesai. Pada Desember mendatang akan kami ajukan ke Baleg, untuk dimasukkan sebagai Prolegnas 2019. Bali sebagai wilayah yang memiliki kekuatan adat istiadat, saat ini banyak mengalami perubahan. Sehingga dengan adanya revisi UU itu, Bali dapat kembali ke jati dirinya,” kata Wayan.

Hal lain yang diusulkan Wayan adalah revisi UU Nomor 33 Tahun 2004. Menurut Wayan, kendati Bali telah menyumbang penerimaan devisa negara hingga 40 persen, namun dengan adanya regulasi UU Nomor 33 Tahun 2004, pihaknya tidak mendapat alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebanding. Namun hal berbeda dirasakan bagi daerah yang menyumbangkan devisa dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), karena dapat merasakan DBH.

Sementara dalam diskusi terungkap beberapa aspirasi yang disampaikan oleh *stakeholder* terkait, seperti poin-poin krusial pada RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Perkoperasian, hingga RUU tentang Masyarakat Adat.

Selain itu, beberapa poin juga diusulkan untuk memperkuat revisi UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren diharapkan berpihak pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), khususnya untuk Bali.

Kunker ke Bali ini juga diikuti Anggota Baleg DPR RI Mohammad Suryo Alam (F-PG), Saiful Bahri Ruray (F-PG), Didi Irawadi Syamsudin (F-PD), Anwar Rachman (F-PKB), Hamdhani (F-NasDem), dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk (F-Hanura).

Hadir dalam pertemuan itu Forkopimda Bali, Kanwil Hukum dan HAM Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, perwakilan Polda Bali, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, civitas akademika Universitas Udayana, Universitas Mahasaraswati, dan Universitas Dwijendra. ■ sf

Komisi X Tolak Serahkan Anggaran Sarpras Kemendikbud pada PUPR

Komisi X DPR RI tidak menyetujui penyerahan alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI sebesar Rp 3,55 triliun pada pagu RAPBN tahun anggaran 2019 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk pembangunan sarana prasarana sekolah, sebelum adanya payung hukum yang jelas.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal Kemendikbud RI terkait RAPBN 2019 di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9).

Sementara terkait pagu anggaran sementara Kemendikbud dalam RAPBN TA 2019 sebesar Rp 35 Triliun, Sutan mengaku pihaknya menyetujui dengan catatan fokus dan arah kebijakan serta program Kemendikbud RI harus diarahkan kepada pengembangan SDM sesuai tema RAPBN 2019 yaitu “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (investasi) Sumber Daya Manusia”.

“Diwujudkan dalam bentuk penguatan kelembagaan yang ada dibawa Kemendikbud, penguatan pendidik dan tenaga kependidikan serta penguatan SDM pengembangan bahasa dan budaya,” jelasnya.

Lebih lanjut legislator Partai Gerindra itu meminta Kemendikbud dalam setiap menyusun kebijakan dan program harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu Komisi X DPR RI berharap, rekomendasi Panja-panja Komisi X DPR RI dipakai sebagai



Foto: Oajje/rni

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.

rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan. Kebijakan-kebijakan strategis Kemendikbud RI yang harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah seperti dalam pembentukan UNBK, K-13 dan rasio guru: siswa.

Komisi X DPR RI juga meminta Kemendikbud untuk memaksimalkan implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui penguatan pendidikan vokasi.

Terkait dengan usulan penambahan kebutuhan harga satuan Program Indonesia Pintar (PIP) TA 2019 sebesar Rp 3 triliun, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud untuk mempertimbangkan jumlah satuan PIP pada jenjang SMA dan SMK agar disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan tersebut. ■ ria/mp

Aspirasi Akademisi Sumsel Perkuat Pembahasan RUU

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap banyak aspirasi dan masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Aspirasi dan masukan itu merupakan bahan masukan yang penting untuk sinkronisasi beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas Baleg DPR RI, maupun untuk Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2019.



Suasana Rapat Tim Kunker Baleg DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Anggota Baleg DPR RI Roy Suryo yang memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg ke Palembang, Sumsel mengatakan, banyak sekali aspirasi penting yang didapat. Mulai permasalahan hukum adat, permasalahan teknologi, dan permasalahan olahraga. Apalagi, Kota Palembang menjadi satu daerah yang sukses menjalankan berbagai acara olahraga.

“Masukan dari masyarakat itu kita dapatkan dari Universitas Sriwijaya, Universitas Palembang, dan Universitas Muhammadiyah di Sumatera Selatan. Masukannya sangat konstruktif dan kami dari Baleg menghaturkan terima kasih atas respon tersebut. Insya Allah itu bisa memperkuat kami dalam penyusunan Prolegnas,” ucap Roy di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Kamis (27/9).

Foto: Rizka/rni

BK DPR Gelar *Workshop* Peningkatan *Supporting System* Fungsi Anggaran

Ketepatan target dari sisi kuantitas, kualitas, waktu dan kesesuaian kebutuhan users merupakan parameter yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu badan dalam memberikan dukungan keahlian kepada anggota dewan.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk dalam *workshop* Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dengan tema ‘Peningkatan *Supporting System* Fungsi Anggaran Melalui Penguatan Organisasi Pusat Kajian Anggaran dengan Dukungan World Bank’ di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9).

Menurut Johnson, parameter itu dapat dilihat dari hasil-hasil kerja Pusat Kajian Anggaran, dari sisi kualitas dan kuantitas yang mampu memberikan

dukungan optimal bagi anggota dewan. Selain itu, ketepatan waktu dalam memasok hasil-hasil kerja juga menjadi suatu hal yang sangat penting diperhatikan.

“Isu-isu yang dikerjakan oleh Pusat Kajian Anggaran memang yang dibutuhkan anggota dewan dalam menjalankan fungsinya. Ketepatan substansi inilah yang dapat kita jadikan ukuran keberhasilan kita dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dewan,” tandasnya.

Namun, hal itu harus diukur secara berkala, agar dapat mengevaluasi sejauh mana organisasi sudah mencapai tujuannya, yakni mendukung anggota



Kepala BK DPR RI Johnson Rajagukguk menghadiri *workshop* Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI.

Foto: Jayadi/rni



Saat ini, jelas Anggota F-PD DPR RI itu, banyak RUU yang masih dalam tahap sinkronisasi, menunggu surat presiden, dan dalam progres pembahasan di level pemerintah atau DPR RI. Ditambahkan Roy, RUU Minuman Keras (Miras) juga mendapat banyak masukan berharga dari masyarakat.

“Misalnya, tradisi miras bagi masyarakat Indonesia Timur sudah menjadi bagian dari kearifan lokal. Ini jadi tantangan menarik bagi Baleg untuk menyusun RUU yang bisa melindungi kearifan lokal,” tandas legislator dapi Di Yogyakarta itu.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Adi Putra Darmawan Tahir menyoroti masukan dari civitas akademika Palembang mengenai RUU Peningkatan SDM. Merespon hal itu, menurutnya perlu payung hukum di bidang peningkatan SDM dan pemerataan pembangunan, sehingga menjadikan Sumsel yang termasuk sudah maju di pembangunan fisik, agar lebih maju lagi dengan dukungan manusianya.

“RUU itu nantinya mengatur segala upaya untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, antara lain pada bidang penelitian juga pemutakhiran alat-alat laboratorium di perguruan tinggi,” kata legislator Partai Golkar dan daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu. ■ ran/sf

dewan dalam menjalankan fungsinya. “Penilaian efektivitas atau ketepatan-ketepatan tersebut tidak bisa dinilai oleh Pusat Kajian sendiri, tetapi harus melibatkan para *stakeholders* pengguna layanan,” jelasnya.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan *workshop* ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para peserta terkait sejauh mana efektivitas dukungan yang diberikan oleh Pusat Kajian Anggaran selama ini. Selain itu, menghimpun masukan untuk perbaikan apalagi yang harus dilakukan agar hasil-hasil kerja Pusat Kajian sesuai dengan kebutuhan anggota dewan sebagai konsumen utama dari produk-produk yang dihasilkan.

Hadir dalam seminar ini Asep Ahmad Saefulloh selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Arun Arya yang merupakan Task Team Leader PFM MDTF dari World Bank sebagai pembicara. ■ ria/mp



Baleg DPR Serap Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 di Semarang

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka menyerap aspirasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2019.

Demikian sambutan Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heru Setiadi, didampingi para SKPD, Kepala Dinas terkait, Perwakilan Akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi serta elemen lembaga swadaya masyarakat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (27/9).

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, sampai saat ini DPR bersama Pemerintah sudah berhasil menyelesaikan dan mengesahkan 5 RUU menjadi Undang-Undang (UU). Sementara 26 RUU Prioritas 2018 adalah RUU Pembicaraan Tingkat I. Ada pula 6 RUU Prioritas 2018 yang masih dalam penyusunan di Presiden.

“Kami hadir di sini untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan dan semua pihak termasuk elemen masyarakat dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019,” imbuh Sarmuji.

Selain itu, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI ini menandakan bahwa tujuan dari kunjungan Baleg DPR RI untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019, terutama RUU Prioritas Tahun 2019 agar mencerminkan kebutuhan UU bagi masyarakat.

“Hasil pertemuan tadi dengan Pemda Semarang beserta elemen masyarakat kami memperoleh masukan agar memperkuat UU yang sudah dibahas pada 2018 untuk bisa dilanjutkan pada tahun 2019,” jelas Sarmuji, usai pertemuan.

Ia menambahkan, beberapa UU yang menjadi sorotan saat diskusi antara lain RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyangkut nasib guru honorer yang hingga saat ini belum diakomodasi pemerintah menjadi PNS. RUU tentang Pesantren, RUU tentang Minuman



Foto: Odjie/rri

Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji memimpin Tim Kunker Baleg DPR RI ke Semarang, Jateng.

Beralkohol juga mendapat sambutan antusias agar bisa segera diselesaikan.

“Namun demikian kami juga jelaskan bahwa proses pembahasan UU di DPR itu melibatkan Pemerintah. Kadang problemnya ada di sisi Pemerintah, ketika DPR sudah sepakat justru pihak Pemerintah dari beberapa unsurnya belum satu suara sehingga pembahasan seolah ‘mandek,’ tandas Sarmuji.

Di lain pihak, PltAsisten I Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Heru Setiadi, mengapresiasi kehadiran Baleg DPR RI dalam rangka menyerap masukan dari daerah terkait penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019.

“Persoalan yang akan diatur dalam UU jika terkait kewenangan pemerintah daerah diharapkan Baleg bisa menerima masukan dalam penyusunannya,” pinta Heru.

Upaya tersebut tentunya akan berimbas pada pelaksanaan jika UU tersebut disahkan tidak berbenturan dengan peraturan daerah. Kami juga bersama DPRD tengah menyusun berbagai Raperda yang kami selalu samakan semangatnya dengan UU yang disusun di tingkat pusat,” pungkash Heru.

Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Semarang ini juga diikuti oleh Anggota Baleg DPR RI Marlinda Irwanti (Golkar), Bambang Riyanto (Gerindra), Bahrum Daido (Demokrat), dan Achmad Fauzan Harun (PPP). ■ oji/mp

Kerja Sama Multilateral Harus Diperkuat untuk Atasi Perubahan Iklim



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berfoto bersama Delegasi Kerja Sama Parlemen Asia-Eropa ke-10 di Brussels, Belgia.



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengusulkan untuk memperkuat kerja sama multilateral dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Nurhayati saat menjadi *Keynote Speaker* pada diskusi panel pengaruh perubahan iklim pada migrasi di Pertemuan Kerja Sama Parlemen Asia-Eropa ke-10 Brussels, Belgia, beberapa hari lalu.

“Sebaiknya di dalam forum Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting ini segera diperkuat hubungan kerja sama multilateral untuk mengatasi *climate change* ini, khususnya dalam menyelesaikan *global compact*,” papar Nurhayati.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perubahan iklim sekarang mempengaruhi setiap negara di setiap benua. Mengganggu ekonomi nasional dan mempengaruhi kehidupan, mengorbankan orang, komunitas, dan negara-negara, hari ini dan bahkan lebih banyak lagi besok. Di antara alasan utama untuk catatan jumlah orang yang terpaksa bermigrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota.

Usulan legislator Partai Demokrat ini disambut baik oleh delegasi parlemen yang hadir pada diskusi ini walaupun ditanggapi oleh berbeda oleh Delegasi Parlemen Rusia. Rusia mengatakan belum tampak adanya perubahan iklim terhadap migrasi, karena menganggap bahwa orang berpindah atau migrasi karena adanya kebutuhan ekonomi. Sementara Delegasi Parlemen Kroasia mendukung penuh usulan Nurhayati. Kroasia menyatakan untuk tidak menunda-nunda lagi dan segera melakukan antisipasi bahwa pengaruh *climate change* ini sudah di depan mata.

Sementara dari data *World Bank* dan *UNESCAP* diketahui bahwa banyak terjadi perpindahan yang seolah-olah karena faktor ekonomi tapi sebenarnya karena perubahan iklim. Dalam diskusi panel tersebut, legislator Partai Demokrat itu menyampaikan contoh yang dialami petani di Indonesia, yang mana ini pun sudah dirasakan di beberapa negara eropa, yaitu terjadi kekeringan sehingga petani-petani mulai kekurangan air.

“Nah ini bahayanya. Kalau di Eropa petaninya masih disubsidi, 40 persen oleh pemerintah. Sementara kalau di Indonesia kan tidak. Jadi, orang sudah meninggalkan pertanian. Apalagi anak-anak mudanya di Indonesia, mereka lebih suka bekerja di kota daripada jadi petani. Ini yang menurut saya bahaya sekali harus segera diantisipasi,” katanya kepada Parlemen usai diskusi tersebut.

Oleh karenanya, legislator dapil Jawa Timur ini memberi penekanan, bahwa sudah saatnya kita tidak lagi menunda-nunda tentang langkah-langkah konkrit dari parlemen terkait pengaruh perubahan iklim pada migrasi ini. “Seperti yang saya contohkan bahwa di Indonesia sudah ada beberapa UU, kita sudah meratifikasi *Paris Agreement*, kita sudah membuat UU tentang Pemberian Dana Desa, dan lain sebagainya. Ini kita berikan contoh, supaya mereka bisa segera mengantisipasi dan presentasi Indonesia ini disambut baik oleh negara-negara lain,” imbuhnya. ■ sc

Foto: Suci/rmi



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membacakan serta menandatangani ikrar komitmen menegakkan Pancasila demi keutuhan NKRI di Lubang Buaya, Jaktim, Senin (01/10). Foto: Jaka/rni



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di dampingi Pimpinan DPR RI melantik sembilan Anggota PAW sisa masa jabatan 2014-2019 (kiri), dan penyerahan IHPS I Tahun 2018 dari BPK (kanan) kepada Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (02/10). Foto: Iwan,Jaka/rni



Komisi IX DPR RI menerima para pekerja PT. Freeport Indonesia yang mengalami PHK secara sepihak, di Gedung DPR RI, Senin (01/10). Foto: Andri/rni